

BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DAN POLITIK DI TURKI

Pembahasan mengenai Turki tidak bisa dilepaskan dari romantismenya terutama bagi umat Islam di dunia. Hal tersebut dikarenakan, Turki menjadi salah satu saksi sejarah dalam peradaban Islam di bawah Kesultanan Utsmani selama kurang lebih 500 tahun. Kesultanan Utsmani didirikan oleh Osman I pada 1281 M dan kemudian berubah menjadi salah satu kekuatan global yang memimpin dunia Islam selama lebih dari lima abad kemudian. Terdapat dua peristiwa sejarah besar yang dikenang terutama bagi dunia Islam sendiri yaitu, *pertama* penaklukan Konstanstinopel pada tahun 1453 M oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih, dan *kedua* keruntuhan Kesultanan Utsmani yang beralih menjadi Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk Ataturk pada 1924 M.

Dengan berakhirnya sistem kekhilafahan, menjadi akhir dari sejarah emas peradaban Islam terutama bagi dunia Islam. Beralihnya model pemerintahan Kesultanan menjadi Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Ataturk Ataturk, membawa Turki menjadi negara yang lebih moderen, demokratis, sekuler, dan lebih berkiblat ke barat. Penghapusan nilai-nilai agama dalam ruang publik atau pemerintahan, menjadi salah satu fokus perhatian Mustafa Kemal Ataturk dalam merestrukturisasi sistem pemerintahan Turki dengan proses sekularisasi. Dengan ideologi sekulerisme tersebut, Mustafa Kemal Ataturk Ataturk berupaya untuk membuat kemajuan di Turki dan membuatnya sejajar dengan negara-negara Eropa yang telah maju. Menurutnya, sekulerisme menjadi pondasi dalam bernegara dan penggerak dalam bidang kemajuan pembangunan daripada menggunakan ideologi

yang berlandaskan agama. Baginya, ideologi agama terutama Islam yang dibawa oleh Kesultanan Utsmani, dianggap sebagai penghambat kemajuan Turki dan tidak lagi menjanjikan. Sehingga demikian, Mustafa Kemal Ataturk memimpin Turki ke arah modernisasi ala barat dan mereformasi secara besar-besaran struktur dalam negara.

Setelah Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk dan para pengikutnya yang disebut sebagai *Kemalis*, memimpin Turki di abad ke-20 dengan berbagai macam aksi kudeta pergantian pemimpin, di abad ke-21 ini, Turki dipimpin oleh Presiden Erdogan dari partai *Adalet ve Kalkinma Partisi/* Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan dan kehadiran AKP, Turki memasuki babak baru dalam perpolitikannya baik secara domestik maupun internasional. Dalam BAB ini, penulis akan membahas mengenai sejarah Turki dan perkembangan politiknya mulai dari zaman klasik hingga abad ke-21 ini.

A. Turki Pada Masa Kesultanan Utsmani

Kesultanan atau dinasti Turki Utsmani (1281-1924 M) merupakan salah satu bentuk dari representasi kekuatan dunia Islam. Pasca berakhirnya kekuasaan dan pengaruh dari dinasti Abbasiyah di Baghdad, Mughal di India, dan Safawi di Persia, Kesultanan Utsmani semakin mengokohkan kekuasaan dan pengaruhnya di dunia terutama dalam dunia Islam. Wilayahnya yang luas mencakup Eropa, Afrika dan Asia—kekuasaan terbentang dari Budapest, Hongaria sampai ke Baghdad, dan dari wilayah semenanjung Ceremenia sampai ke hulu sungai Nil, Mesir—membuat

Kesultanan Turki Utsmani menjadi salah satu kekuatan Islam yang berkembang pesat pada saat itu (Junaidi, 2016).

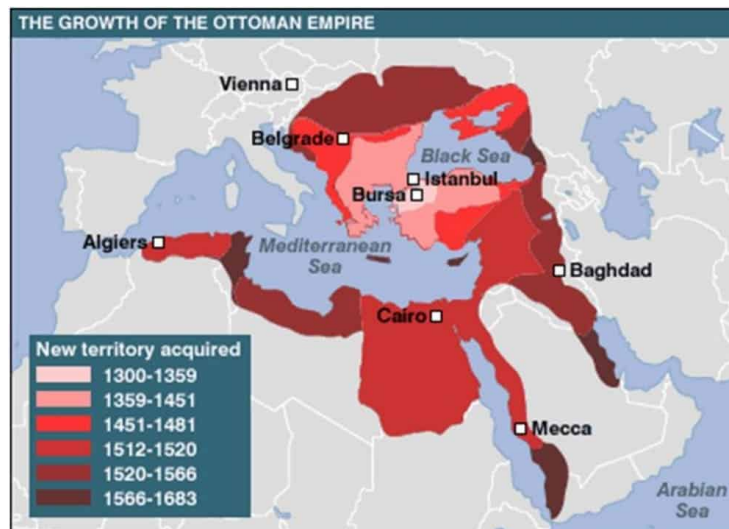
Gambar 2. 1: Lambang Kesultanan Turki Utsmani



Dilihat dari sejarah peradaban, Kesultanan Turki Utsmani merupakan dinasti yang melanjutkan estafet kekuasaan dari bani Saljuk (1037 M), yang pada saat itu di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Turki Utsmani memiliki asal muasal dari keluarga Qabey yang masih satu kabilah Ghaz di Turki yang mendiami wilayah Turkistan. Keluarga Qabey dipimpin oleh seorang yang bernama Ertoghrul dan dibawah kepemimpinannya, keluarga Qabey mengabdikan diri mereka kepada sultan Saljuk, Allaudin. Dinasti Saljuk dan keluarga Qabey pernah berperang melawan Kekaisaran Byzantium dan mereka pun memenangi berbagai macam pertermuran. Atas loyalitas dan keberanian dari keluarga Qabey, Sultan Allaudin memberikan hadiah kepada keluarga Qabey berupa sebidang tanah yang bertempat di dekat perbatasan wilayah Kekaisaran Byzantium dan memiliki wewenang untuk bisa memperluas wilayahnya tersebut (Junaidi, 2016).

Setelah kematian pemimpin Ertoghrul, keluarga Qabey menunjuk pemimpin keluarga baru atas dasar persetujuan dari Sultan Allaudin. Maka pada akhirnya, kepemimpinan jatuh pada Usman (1281-1324 M). Dengan kepiawaiannya memimpin keluarga Qabey dan kesetiaannya terhadap dinasti Saljuk, ia diberikan wewenang untuk dapat memiliki kekuasaan penuh atas wilayah yang telah ia tempati. Pada akhirnya, Usman mendirikan dinasti baru yang mana nama dinasti tersebut disandarkan dari namanya yaitu Kesultanan Turki Utsmani (Fu'ad, 2016).

Gambar 2. 2: Peta Perkembangan Ekspansi Wilayah Kesultanan Turki Utsmani



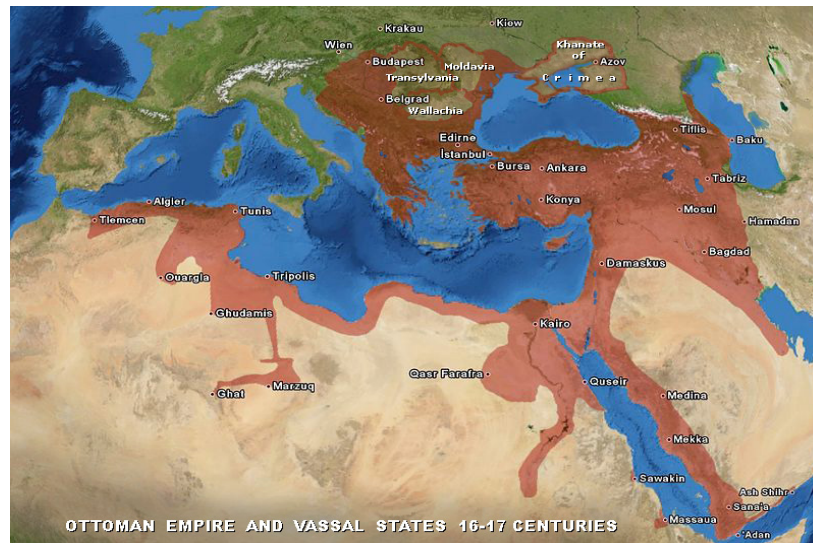
1. Masa Keemasan Kesultanan Turki Utsmani

Dalam perjalanan sejarah peradaban Kesultanan Turki Utsmani, terdapat masa-masa keemasan tersendiri sebagaimana yang terjadi oleh dinasti Islam lainnya. Selain peristiwa penaklukan wilayah Konstantinopel oleh Sultan Muhammad al-Fatih pada 1453 yang fenomenal, terdapat masa keemasan lain yang diraih oleh Kesultanan Turki Utsmani terutama dalam bidang pemerintahan. Masa keemasan tersebut dicapai oleh seorang sultan bernama Sulaiman al-Qanuni (Sulaiman I)

yang merupakan Sultan Turki Utsmani yang ke-10 dan berkuasa dari 1520 sampai 1566 M. Penyetanan gelar '*al-Qanuni*' yang berarti "pembuat undang-undang atau hukum" menandakan bahwa, penyetanan gelar tersebut sebagai tanda penghormatan rakyat kepada pemimpinnya yang telah berjasa dalam mengatur pemerintahan yang baik. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya kitab undang-undang *Multaqa al-Abrar* yang disusun oleh Ibrahim al-Halabi atas perintah Sultan Sulaiman al-Qanuni. Kitab tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani sampai abad ke-19 (Junaidi, 2016).

Dibawah kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni, Kesultanan Turki Utsmani berhasil memperluas kekuasaannya ke berbagai wilayah seperti Yaman, Tunisia, Irak, Belgrade (Serbia), Pulau Rhodes (Yunani), dan Budapest (Hungaria). Dalam mencapai perluasan wilayah tersebut, tidak lepas dari perang angkatan militer Turki Utsmani yang bernama *Yenissari*. Pasukan Yenissari merupakan korps militer yang beranggotakan anak-anak kristen yang kemudian diberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dan pendidikan militer (Fu'ad, 2016).

Gambar 2. 3: Peta Ekspansi Kesultanan Turki Utsmani Abad 16-17 M



Selain berhasil dalam bidang hukum dan militer, Sultan Sulaiman al-Qanuni juga berhasil dalam bidang infrastruktur. Salah satu karya bangunan yang paling fenomenal adalah pembangunan Masjid Raya Sulaimaniyah yang dibangun pada 1550 dan selesai pada 1558 M. Masjid ini di kemudian hari menjadi makam dari Sultan Sulaiman al-Qanuni (Wisatalova, 2017).

2. Periode Pembaharuan Kesultanan Turki Utsmani dalam Era Tulip

Sebelum memasuki periode *Tanzimat*, Kesultanan Turki Utsmani telah mengalami perubahan secara fundamental dalam bidang kultural sebagai akibat dari interaksi dengan bangsa Eropa. Proses interaksi tersebut berawal dari gagalnya Kesultanan Turki Utsmani dalam menginvasi wilayah Vienna pada 1683 M dibawah kepemimpinan Sultan Muhammad IV (1648-1687 M). Dari gagalnya ekspansi tersebut, Kesultanan Turki Utsmani menyadari dan mengakui superioritas barat terutama Eropa dalam bidang politik, militer, dan sosial-budaya.

Pada tanggal 12 Juli 1718 dimana terdapat peristiwa Perjanjian Passarowitz di Serbia, yang mana mengakhiri perang Austro-Turki dan Venesia (1716-1718 M) . Dengan adanya perjanjian tersebut, menandai awal lahirnya era baru yang disebut dengan “Era Tulip” yang berlangsung dari tahun 1718-1730 M dan menandai berakhirnya ekspansi Kesultanan Turki Utsmani di Eropa. Era Tulip merupakan penggambaran suatu masa dimana pada saat itu munculnya perdamaian dan kemakmuran. Pada era ini, Kesultanan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Ahmed III (1703-1730 M) yang merupakan anak dari Sultan Mehmed IV dan menggantikan saudaranya, Mustafa II.

Memasuki Era Tulip, Sultan Ahmed III menggunakan kesempatan tersebut untuk merubah orientasi pemerintahannya dari timur ke barat yaitu Eropa. Sultan Ahmed III mulai membuka dan menjalin hubungan serta kerjasama dengan negara-negara Eropa, sehingga dari interaksi tersebut menghasilkan berbagai macam reformasi dan renovasi dalam pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Ahmed II lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai masyarakat dan kebudayaan di Eropa, sebagai bentuk inspirasi dalam pemerintahannya. Masa ini juga biasa disebut dengan *renaissance*-nya Turki Utsmani dalam skala yang kecil. Salah satu bentuk jalinan hubungan antara Turki Utsmani dengan negara-negara Eropa adalah, pada tahun 1720, Sultan Ahmed III mengutus Duta Besar Yirmisekiz Mehmet Celebi ke Prancis, untuk mengunjungi istana Raja Louis XIV. Di sana, Celebi berkunjung ke berbagai tempat di Prancis untuk mengamati tentang berbagai karya kemajuan peradabannya dan dijadikan sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam penerapannya di Kesultanan Turki Utsmani. Periode ini

menandai bahwa Kesultanan Turki Utsmani telah memasuki awal era kebangkitan intelektual (Kuncahyono, 2018).

3. Periode Gerakan Tanzimat

Setelah Era Tulip berakhir pada 1730 M akibat terjadinya Revolusi Patrona Halil dan berakhirnya kekuasaan Sultan Ahmad III, Kesultanan Turki Utsmani memulai usaha modernisasi yang bertujuan merestrukturisasi terutama dalam bidang aperatur negara dibawah kepemimpinan Sultan Selim II (1789-1807 M). Pada periode kepemimpinan Sultan Selim II, Kesultanan Turki Utsmani mengalami perombakan internal seperti reformasi dan sentralisasi berbagai institusi kerajaan terutama dalam bidang militer, pasca kekalahan dalam perang melawan Rusia pada 1792 (Dogan, *The Origins of Liberalism and Islamism in The Ottoman Empire (1908-1914)*, 2007).

Pada tahun 1807, terjadi peristiwa politik dimana Sultan Selim II dijatuhkan dari tampuk kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani dan dalam peristiwa itu ia dibunuh. Kemudian estafet kekuasaan diganti oleh Sultan Mustafa IV, namun ia hanya berkuasa dalam waktu yang singkat dikarenakan munculnya kelompok pemberontak yang menyingkirkannya. Pada akhirnya, kekuasaan dilanjutkan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839 M) yang merupakan sultan yang ke-33. Dibawah kepemimpinan Sultan Mahmud II, dikenal dengan munculnya masyarakat kelas intelektual Utsmani moderen. Hal tersebut dikarenakan kebijakannya yang mereformasi pemerintahan terutama dalam bidang hubungan luar negeri. Sultan Mahmud II membuka pintu untuk melakukan diplomasi dengan negara lain untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan luar negeri. Para diplomat dan pegawai

negeri dilatih untuk belajar bahasa asing. Selain itu, para pegawai yang bekerja dalam bidang birokrasi, adalah orang-orang yang memiliki pemikiran *Europeanized* dan moderen. Hal ini menandakan bahwa Kesultanan Turki Utsmani mencapai awal masa *Tanzimat* (Reorganisasi) (Kuncahyono, 2018).

Periode *Tanzimat* lainnya yang dikenal dengan sebutan *Tanzimat-i Hayriye* (Reorganisasi yang menguntungkan), terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Abdulmeced I (1839-1861 M). Dikatakan periode reorganisasi yang menguntungkan karena, kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Abdulmeced I berupa pendirian *Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliye* (Dewan Tertinggi Ordonasi Yudisial) yang merupakan sebuah badan penasehat yang bergerak dalam bidang masalah-masalah hukum. Dewan tersebut kemudian mengeluarkan dekrit pada tahun 1856 bernama Dekrit Islahan, yang mana isinya menegaskan bahwa pelarangan bentuk diskriminasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan) dan menegaskan pada pentingnya persatuan (McCarthy, 2001).

Puncak dari masa *Tanzimat* ini terjadi pada periode kepemimpinan Sultan Abdulhamid II (1876-1909 M) yang dikenal sebagai masa *I. Mesrutiyet* (Konstitusional Pertama). Hasil dari proses konstitusi tersebut salah satunya adalah terjadi proses transisi dari monarki absolut ke konstitusional pada 23 Desember 1876 M. Konstitusi 1876 berisi tentang penghormatan terhadap pemenuhan hak-hak setiap orang dan kebebasan. Sebagai contoh, dalam Pasal 19 menjelaskan mengenai definisi warga negara Turki Utsmani, yaitu “Semua warga negara yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani disebut dengan *Ottomans*, tanpa membedakan apapun latar belakang dan keyakinan yang mereka anut”, menetapkan

bahwa seluruh warga negara Turki Utsmani (Pasal 17), diperlakukan sama dalam hukum, dan pemberlakuan bahasa Turki sebagai bahasa resmi negara (Pasal 18). Selain itu, di dalam Konstitusi 1876 juga menjamin hak-hak fundamental warga negaranya seperti hak untuk mendapatkan jaminan keamanan hidup (Pasal 8), hak kebebasan dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 11), hak untuk memperoleh pendidikan yang layak (Pasal 15), dan hak-hak lainnya yang terkandung dalam Konstitusi 1876 (Gozler, 2005).

Meskipun Konstitusi 1876 tersebut memberikan pendefinisian terhadap hak kedaulatan antara sultan dan warga negara, namun menurut Pasal 7 Konstitusi 1876, sultan masih memiliki kedaulatan/otoritas penuh dalam pemerintahan. Hal tersebut menjadikan Kesultanan Turki Utsmani menetapkan sistem pemerintahannya sebagai “Monarki semi-konstitusional.” Meskipun di dalam konstitusi tersebut masih terdapat hak istimewa dalam diri sultan, dan pemberian hak-hak fundamental terhadap warga negara, namun Konstitusi 1876 sempat dihentikan oleh Sultan Abdulhamid II dengan alasan untuk mempertahankan kekuasaan absolutnya. Hal tersebut justru menjadi pemicu munculnya gerakan revolusi yang diinisiasi oleh kelompok *Young Turks* (Turki Muda) untuk menekan sultan memberlakukan kembali Konstitusi 1876. Peristiwa tersebut menjadi awal dari periode *İkinci Meşrutiyet* (Konstitusional Kedua) pada 1909, dimana terdapat proses amandemen konstitusi, peningkatan lembaga legislatif, dan pembatasan otoritas kekuasaan sultan (Kuncahyono, 2018).

B. Turki Periode Revolusi Kelompok Kemalis: Berdirinya Republik Turki

Memasuki abad ke-20, Kesultanan Turki Utsmani terlibat peristiwa besar dalam Perang Dunia I dimana Turki Utsmani bergabung dengan kelompok *central powers* (Jerman, Austria-Hongaria, dan Bulgaria) melawan kelompok sekutu (Inggris, Prancis, Italia, dan Rusia). Meskipun dalam Perang Dunia I pihak *central powers* mengalami kekalahan termasuk Kesultanan Turki Utsmani, namun terdapat beberapa momen dimana Turki Utsmani berhasil melawan serangan invasi dari pihak sekutu di wilayahnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Mustafa Kemal Atatürk. Namanya mulai dikenal pasca peperangan antara Italia-Turki Utsmani (1911-1912 M), Perang Balkan (1913 M)—pada perang ini, Kesultanan Turki Utsmani harus kehilangan hampir seluruh wilayah kekuasaannya di Eropa—, dan puncaknya pada peristiwa serangan Dardanella, Gallipoli pada 1915 M dimana saat itu pasukan Kesultanan Turki Utsmani dibawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk berhadapan dengan pasukan sekutu yaitu Inggris dan Perancis. Kemenangan atas mempertahankan wilayah Gallipoli semakin meningkatkan nama, reputasi, dan pengaruh dari seorang Mustafa Kemal Atatürk.

Pasca peristiwa Perang Dunia I, Kesultanan Turki Utsmani telah kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya akibat dari Perjanjian Lausanne di Swiss pada 24 Juli 1923 M. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari Kesultanan Turki Utsmani, Prancis, Inggris, Italia, Rumania, Yunani, Kerajaan Serbia, Slovenia (Yugoslavia), Kroasia, dan Jepang. Isi dari perjanjian tersebut adalah Kesultanan Turki Utsmani tidak mempunyai pengaruh atas klaim di wilayah Arab, mengakui wilayah Siprus sebagai bagian kepemilikan dari Inggris, wilayah Dodecanese

(kumpulan pulau yang berada di Laut Aegea, sekarang menjadi milik Yunani), dan mengakui perbatasan wilayah Turki Utsmani.

Selain kehilangan wilayah kekuasaan, Kesultanan Turki Utsmani dan warga negaranya, menurut Mustafa Kemal Atatürk, mengalami kemunduran baik dalam politik, sosial, dan budaya. Pada saat itu, Kesultanan Turki Utsmani dikenal oleh negara-negara Eropa sebagai *Sick man of Europe*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mustafa Kemal Atatürk melakukan perubahan secara radikal dan fundamental terutama dalam sistem pemerintahan dimana menurutnya sistem kesultanan harus diganti dengan sistem yang diterapkan oleh negara-negara Eropa saat ini yaitu konsep *nation-state*.

Langkah pertama yang Mustafa Kemal Atatürk lakukan adalah dengan mendirikan Majelis Nasional Agung melalui hasil Kongres Erzurum dan Sivas pada 23 April 1920. Dari hasil kongres tersebut, diputuskan bahwa Mustafa Kemal Atatürk dipilih sebagai presiden dalam Majelis Nasional Agung. Kemudian setelah peristiwa Perjanjian Lausanne di Swiss yang mana menetapkan batas wilayah kedaulatan bagi Turki moderen, pada 29 Oktober 1923, Republik Turki akhirnya didirikan dengan Mustafa Kemal Atatürk yang terpilih menjadi presiden dari Republik Turki.

Revolusi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan para pengikutnya (kemalis) bertujuan untuk mengganti rezim lama yang berbentuk kesultanan menjadi rezim yang berbentuk *nation-state* baru ala barat. Proses reformasi dan restrukturalisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk berupa nasionalisasi

dan modernisasi terutama dalam struktur sosial agar menyesuaikan dengan negara-negara Eropa. Revolusi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk bertujuan untuk mendirikan sebuah negara-bangsa yang berlandaskan pada sekulerisme (*laikik nation state*).

Revolusi Turki di bawah Mustafa Kemal Ataturk memiliki dua tahap, *pertama*, pada periode Perang Kemerdekaan (Greco-Turki) pada 1918 M sampai periode penghapusan sistem khilafah/kesultanan pada Maret 1924. Tahap ini ditandai dengan proses perubahan konsitusional secara fundamental dalam negara dari penghapusan kesultanan, sistem khilafah, pendirian Republik Turki, dan pembuatan konstitusi baru yang berdasarkan pada sekulerisme. Dengan kata lain, pada tahap yang pertama ini, tujuannya adalah proses sekularisasi politik. *Kedua*, periode ini disebut dengan penegasan Kemalisme sebagai garis besar otoritatif sejarah dan ideologi revolusi Turki. Gerakan pencerahan yang disebut dengan kemalisme tersebut memiliki formula yang disebut dengan formula tiga kebebasan yaitu kebebasan dalam gagasan, kebebasan dalam kesadaran, dan kebebasan dalam memperoleh pengetahuan. Orang-orang yang tergabung dalam Kemalisme disebut dengan *Kemalis* atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk (Kuncahyono, 2018).

C. Republik Turki di bawah Kepimpinan Mustafa Kemal Ataturk

Pasca runtuhnya sistem khilafah pada 3 Maret 1924, dan berdirinya Republik Turki, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, melakukan proyek nasionalisasi dan modernisasi secara besar-besaran. Mustafa Kemal Ataturk

bertekad untuk membawa Republik Turki menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara di Eropa, dengan cara merestrukturisasi sistem hukum dan tata negara seperti di Eropa.

Upaya restrukturisasi yang paling fenomenal adalah proses pemisahan agama dari institusi negara atau sekulerisasi. Hal tersebut dipertegas dalam Amandemen 1928 dimana kalimat “*Agama resmi dalam negara Turki adalah Islam*” dihapus dan konstitusi diganti dengan sekulerisme. Agama yang pada awalnya berada di dalam naungan Kementrian Agama, berpindah tangan kepada Kementrian Sekuler. Dengan adanya Kementrian Sekuler, negara memiliki wewenang untuk mengatur segala urusan agama termasuk penyampaian dakwah di berbagai masjid. Selain itu, para imam dan khotib merupakan para pegawai yang diangkat oleh negara dan digaji oleh negara. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan di setiap masjid, haruslah sesuai dengan ‘pesanan’ negara (Rofii, 2019).

Selain itu, rezim Mustafa Kemal Ataturk memonopoli pemerintahan melalui partai CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*) atau Partai Rakyat Republik sebagai partai tunggal. Dengan demikian, CHP memiliki wewenang penuh atas segala instrumen negara Republik Turki demi mencapai tujuan mereka yaitu mewujudkan masyarakat sekuler. Dampak dari monopoli tersebut adalah peredaman kebebasan pers, setiap rumah ibadah berada dalam pengawasan negara, pelarangan gerakan sipil yang dinilai memiliki potensi ancaman bagi negara, dan lain sebagainya.

C. Enam Prinsip Ideologi Kemalisme dalam Turki Moderen

Berdirinya Republik Turki sebagai model pemerintahan yang baru bagi Turki, membuat Mustafa Kemal Atatürk berusaha mencari visi pembangunan yang berlandaskan pada nilai ideologi dan filosofis yang lebih moderen. Visi tersebut dikenal sebagai ‘enam prinsip kemalisme’. Dengan visi tersebut, Mustafa Kemal Atatürk ingin mengubah Turki menjadi republik yang berdaulat, sekular, percaya diri, demokratik, dan moderen, sebagai sarana dalam revolusi perubahan politik, teknologi, dan sosial. Enam prinsip kemalisme tersebut adalah (Kuncahyono, 2018):

1. Republikanisme

Republikanisme dapat diartikan sebagai proses pemerintahan yang melalui kehendak rakyat, pemilihan para anggota parlemen, pergantian jabatan, dan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, prinsip republikanisme adalah proses demarkasi kekuasaan dari tangan sultan yang kemudian beralih ke kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang direpresentasikan dalam bentuk parlemen (Rofii, 2019). Reformasi yang dilakukan oleh para kemalis berusaha untuk mengganti sistem kesultanan yang multinasional menjadi sistem *nation-state*. Mereka beranggapan, dengan berdirinya Republik Turki menggantikan sistem Kesultanan Turki Utsmani, menjadi harapan dan wakil yang paling baik bagi rakyat Turki.

2. Nasionalisme

Munculnya prinsip nasionalisme sebagai anti-tesis dari ideologi pan-Islamisme yang dianut oleh Kesultanan Turki Utsmani dimana secara

geografis mencakup berbagai wilayah, ras, agama, dan suku bangsa. Pasca kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I, banyak kalangan yang mempertanyakan dan meragukan eksistensi masa depan kesultanan. Munculnya Mustafa Kemal Atatürk yang membawa ideologi nasionalisme Turki membuat banyak dukungan yang mengalir kepadanya. Menurutnya, dengan adanya nasionalisme tersebut, akan membangkitkan semangat kebangsaan, mempertahankan identitas dan kedaulatan Turki daripada terus mempertahankan semangat kesultanan atau Islam. Dengan demikian, nasionalisme disini bermakna negara yang independen, kuat, dan bebas dari pengaruh atau dominasi negara lain.

Menurut Mustafa Kemal Atatürk nasionalisme Turki mendefinisikan orang Turki sebagai “Orang yang melindungi dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, spritual, dan moral dari Bangsa Turki”. Sedangkan maksud dari Bangsa Turki sendiri adalah “Orang yang tinggal di wilayah kekuasaan Republi Turki, selalu mencintai dan memuliaan negara dan keluarganya, mengetahui dan melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap negara sekuler, sosial, dan demokratik, demi keuntungan dan kepentingan bersama dari penduduk negeri”.

3. Populisme

Populisme dapat diartikan sebagai kekuasaan dan kontrol rakyat terhadap pemerintahan demokrasi (*the government of the people, with the people, for the people*). Berbeda halnya dengan prinsip yang digunakan pada masa Kesultanan Turki Utsmani, dimana kekuasaan hanya bertumpu pada

satu kekuasaan terpusat yaitu sultan, bukan rakyat. Populisme yang dikenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk adalah dimana setiap warga negara mempunyai pengakuan yang sama di mata hukum dan tidak memandang baik itu faktor suku, ras, agama, maupun gender. Selain itu, Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk, berusaha untuk melindungi hak-hak warga negara baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan identitas.

4. Statisme/Etatisme

Dalam prinsip ini, negara memiliki wewenang untuk mengintervensi masalah dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan negara menjunjung tinggi kepentingan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, daripada menjunjung kepentingan individual atau korporasi semata. Maksudnya adalah, negara tidak hanya sebagai peletak dasar dalam bidang ekonomi, namun juga sebagai pemilik dari sektor ekonomi yang berada di Turki. Dengan demikian, dalam hal ini, negara tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada sektor swasta untuk membuka lapangan pekerjaan, karena seluruh sektor dikuasai oleh negara. Hasil atau *ouput* dari prinsip etatisme pada masa kemalis, adalah terciptanya sistem industrial di Republik Turki.

5. Sekulerisme

Sebelum membahas lebih jauh, sangat penting untuk membedakan definisi antara sekuler, sekulerisme, dan sekularisasi. Kata 'sekuler' merujuk pada aktor atau subyek yang berkeyakinan bahwa sekulerisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari subyek tersebut. Sedangkan makna sekulerisme merujuk pada konsepsi mengenai dunia sekuler yang berubah

menjadi ideologi. Adapun sekularisasi, merupakan sebuah proses transformasi yang terjadi secara dinamis. Misalkan sebelum dikenalnya sekulerisme, masyarakat cenderung lebih dekat dengan agama dan membuatnya menjadi masyarakat yang religius, namun ketika mereka sudah mengenai sekulerisme dan terjadi proses sekularisasi yang didominasi oleh negara dalam segala bidang terutama ruang publik, maka terdapat pemisahan antara urusan negara dengan urusan agama dalam ruang publik (Calhoun & Juergensmeyer, 2011).

Terdapat dua macam model sekulerisme yaitu pasif dan asertif. Sekulerisme pasif yaitu dimana negara tidak mengintervensi urusan agama, justru negara memberikan tempat bagi agama seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan pengadaan simbol-simbol agama di ruang publik. Dalam hal ini, negara berperan untuk memberikan kebebasan dan izin bagi agama untuk berada di ruang publik. Sedangkan sekulerisme asertif merupakan kebalikannya, di mana negara tidak memberikan ruang bagi kegiatan dan pengadaa simbol-simbol agama, serta negara ikut mengintervensi segala urusan agama. Negara membuat kebijakan yang bersifat larangan dalam eksistensi agama, sehingga negara memiliki kontrol atas agama (Rofii, 2019).

Dari penjelasan model sekulerisme diatas, Republik Turki pada masa Mustafa Kemal Atatürk menerapkan model sekulerisme asertif yang mana negara secara aktif mengontrol segala urusan/kegiatan dan simbol-sombol agama.

6. Revolusionisme

Dalam rangka usaha penyesuaian diri dengan modernisasi dan demi kepentingan kemajuan masyarakat Turki ke arah yang lebih baik lagi, Republik Turki melakukan perubahan secara progresif pada setiap bidangnya dengan prinsip revolusionisme. Prinsip tersebut juga dapat diartikan sebagai ‘pencerahan’ secara menyeluruh kepada setiap masyarakat di Turki demi mendukung realisasi pembangunan secara integral dan memenuhi tujuan-tujuan yang sudah digariskan. Di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Republik Turki melakukan reformasi dengan cara mengganti segala bentuk institusi tradisional menjadi institusi moderen.

Proses reformasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk selama periode perkembangan Republik Turki, semata-mata demi meruntuhkan warisan Kesultanan Turki Utsmani dalam bidang politik, sosial, dan budaya, serta menjadikan Turki sebagai negara yang moderen berasaskan sekulerisme. Proses ini dikenal dengan sebutan *Turkification* yaitu di mana setiap orang mempunyai hak yang sama, pendefinisian diri sebagai orang Turki, dan privatisasi masalah/urusan agama. Menurut Mustafa Kemal Atatürk, pembentukan suatu bangsa tidak ada kaitannya dengan persatuan agama. Baginya, pembentukan suatu bangsa didasarkan pada orang-orang yang memiliki warisan sejarah yang sama, memiliki ketulusan keinginan untuk hidup secara bersama, dan memiliki kehendak dan tujuan yang sama untuk memelihara warisan mereka.

D. Turki Abad-21: Di Bawah Kepemimpinan Presiden Erdogan

1. Profil Singkat Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan lahir di Kasimpasa yang merupakan sebuah kawasan padat di wilayah Istanbul, pada 26 Februari 1954 M (Sansal, t.thn.). Ia berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang nahkoda pada suatu agen pelayaran, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Lingkungan Kasimpasa yang padat, dan dihuni sebagian besar oleh rakyat kecil yang hidup sederhana, menjadikan Erdogan harus membantu keluarganya demi memenuhi kebutuhannya hidupnya seperti menjual roti, lemon, rempah-rempah, dan air di jalanan. Dari kehidupan tersebut, membuat Erdogan sudah terbiasa dalam menjalani kehidupan sebagai rakyat kecil dan berbagai macam kesederhanaan dan kesusahannya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perjalanan hidupnya yaitu dari ayahnya, lingkungan Kasmpasa, gurunya, dan ajaran sufisme (Rofii, 2019).

Sebelum terjun dalam dunia perpolitikan, Erdogan merupakan lulusan dari sekolah *Imam Hatip Okul*—sekolah berbasis agama yang tingkatnya setara dengan SMA milik pemerintah, di mana lulusanya rata-rata menjadi imam dan khatib—dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Marmara, Istanbul, Jurusan Ekonomi dan Perdagangan pada tahun 1980 M. Selain itu, ia juga mahir dalam berbahasa Arab dan Inggris.

Erdogan mulai tertarik pada dunia politik bermula pada tahun 1969, di mana ia bergabung dalam gerakan politik pimpinan Necmettin Erbakan yang bernama *Milli Gorus Teskilati* atau Asosiasi Pandangan Nasional. Kiprah politiknya

berkembang sangat pesat, terbukti dalam waktu cukup singkat dari pimpinan divisi pemuda partai PKN (Partai Keselamatan Nasional/*Misi Selamat Partisi*) di Distrik Beyoglu, Istanbul, Erdogan dipercaya untuk memimpin Partai Refah di Istanbul pada 1986. Dari prestasinya tersebut, Erdogan pernah dicalonkan menjadi wali kota di Istanbul sebanyak dua kali yaitu pada pemilu 1989 dan 1994. Meskipun pada pemilu 1989, Erdogan kalah dalam pemilihan wali kota, namun perolehan suara yang didapatkan meningkat secara signifikan. Barulah pada 1994, Erdogan akhirnya memenangkan konstetasi pemilu wali kota Istanbul. Di bawah kekuasaannya, Istanbul berubah menjadi kota yang berkembang pesat dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang memadai. Setelah menjabat sebagai wali kota di Istanbul, Erdogan terpilih menjadi Perdana Menteri Republik Turki pada tahun 2003 sampai 2014. Kemudian setelah itu mencalonkan diri dan terpilih sebagai Presiden Republik Turki pada 2014. Pada 2016, Erdogan dipercaya lagi oleh rakyat untuk memimpin Turki dua periode kedepan setelah memenangi pemilihan presiden Turki (Rofii, 2019).

2. Model Perpolitikan Erdogan dalam Bingkai Islamisme

Kisah perjalanan perpolitikan Erdogan tidak dapat disipahkan dari seseorang yang bernama Necmettin Erbakan. Erbakan merupakan seseorang yang memiliki ideologi perjuangan islamisme, dimana ia ingin mengembalikan identitas bangsa Turki yang islami dari pengekanan sekelurisme Kemal Ataturk. Semangat islamisme yang digelorakan oleh Erbakan ditambah dengan latar belakang pendidikan Erdogan yang merupakan lulusan sekolah *Imam Hatib Okul*, membuat Erdogan dikenal dengan identitas islaminya yang kuat terutama dalam model

perpolitikannya. Islmisme dalam model berpolitik yang digunakan oleh Erdogan berdasarkan pada konsep politik profetik—suatu usaha perjuangan dalam politik untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan pedoman nilai-nilai syariat agama Islam— dimana didalamnya terdapat tiga unsur penting yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 2001).

a. Humanisasi Erdogan dalam Menjadi Teladan Masyarakat Turki

Arti dari humanisasi dalam politik profetik secara sederhana dapat diartikan sebagai “memanusiakan manusia”. Terdapat perbedaan makna humanisasi antara pandangan barat yang lebih condong pada humanisme antroposentris, dengan makna humanisasi islam yang berdasarkan Al-quran dan Hadits. Makna humanisasi menurut pandangan barat berawal dari peristiwa pemberontakan terhadap dogma gereja yang kaku dan absolut di abad pertengahan. Humanisme barat atau peradaban antroposentris memiliki anggapan bahwa manusia adalah pusat alam semesta dimana Tuhan tidak lagi dijadikan sebagai pusat kehidupan. Sedangkan makna humanisasi islam dalam politik profetik Kuntowijoyo dikenal sebagai humanisme teosentris sebagai bentuk pengangkatan martabat manusia.

Dalam Islam, konsep humanisasi dikenal sebagai *amar ma'ruf* (memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik) sebagaimana firman Allah dalam Al-quran:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:71). Dengan demikian humanisasi dalam Islam memiliki makna bahwa dengan memusatkan diri (taat) kepada Allah melalui keimanan salah satu caranya adalah dengan *beramar ma'ruf*, maka akan menjadikan manusia yang bermartabat dan dapat memanusiakan manusia.

Dalam humansiasi politik profetik, sebagai seorang muslim dan publik figur, Presiden Erdogan memilih untuk membangkitkan prinsip nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Turki. Islamisme sebagai model berpolitiknya yang ditunjukkan dengan kharisma, keteladan, dan kebijakan yang dihasilkannya, mampu membuat masyarakat Turki membangkitkan semangat Islamismenya. Hal tersebut ditandai dengan pidatonya yang mengatakan “Kami memiliki senjata yang tidak kalian miliki. Senjata itu adalah keimanan. Kami memiliki akhlak Islam, teladan bagi umat manusia, Rasulullah SAW” (Islampos, 2017). Dengan demikian, apa yang telah

dikatakan oleh Erdogan tersebut telah sesuai dengan konsep humanisasi dalam politik profetik, yaitu memanusiaikan manusia dengan cara memusatkan diri kepada Tuhan melalui keimanan demi mencapai derajat kehidupan yang lebih baik (Junaidi, 2016).

b. Konsep Liberasi dalam Mereformasi Turki di Berbagai Bidang

Apabila konsep humanisasi menurut agama didasarkan pada konsep *amar ma'ruf*, maka sebagai pelengkapanya, liberasi didasarkan pada konsep *nahi munkar* (mencegah pada perbuatan yang buruk). Secara istilah makna tersebut dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memuliakan manusia dengan cara mengingatkan manusia lain untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang dapat menodai harkat dan martabat manusia. Liberasi dalam politik profetik menurut Kuntowijoyo memiliki empat sasaran yang mana sasaran tersebut mmebuat manusa menjadi terbelenggu dan tidak bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang merdeka. Empat sasaran itu adalah sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Selain itu, fokus tanggung jawab dalam liberasi politik profetik yaitu membebaskan manusia dari keterpurukan akibat kemiskinan, dominasi dan hegemoni struktural yang menindas, sehingga proyek liberasi sangat berhubungan dengan fenomena seperti kemiskinan dan penindasan manusia.

Setelah AK Parti di bawah kepemimpinan Erdogan memenangkan pemilu pada November 2002, segera mereka melakukan misi perjuangan sesuai dengan manifesto partai salah satunya adalah memulihkan perekonomian Turki akibat krisis untuk menyejahterakan rakyat dan

memajukan negara Turki. Ketika Erdogan memimpin pasca pemilu 2002, *gross domestic bruto* (GDP) Turki pada saat itu adalah US\$ 238.428 Juta dengan GDP per-kapita US\$ 3.659, namun pada 2013 Turki mencapai titik tertinggi dalam pencapaian GDP nya yaitu US\$ 950.579 Juta dengan GDP per-kapita US\$ 12.519 (World Bank, 2018).

Upaya yang dilakukan oleh Erdogan dalam memulihkan perekonomian dan menaikkan kesejahteraan masyarakat Turki yaitu melalui manajemen SDM, manajemen informasi, dan manajemen keuangan. Terbukti dari upaya tersebut masyarakat Turki pada 2013 pendapatan rata-ratanya (GDP per-kapita) menyentuh angka US\$ 12.619 dan pada tahun 2017 tingkat kemiskinan turun menjadi 13.5% yang sebelumnya 14.7% (World Bank, 2017). Dengan demikian, segala upaya yang dilakukan oleh Erdogan dalam mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan krisis ekonomi yang melanda Turki memiliki esensi bahwa pelaksanaan liberasi politik profetik berusaha untuk melepaskan belenggu keterpurukan masyarakat Turki akibat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Konsep Transendensi Erdogan sebagai Pemimpin yang Agamis

Dari penjelasan mengenai konsep humanisasi dan liberasi di atas, konsep transendensi merupakan dasar dari kedua konsep sebelumnya. Transendensi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia agar mencapai kehidupan yang bermakna dimana didalamnya terdapat nilai-nilai transendental (keimanan). Sehingga konsep transendensi menggunakan dan menempatkan nilai-nilai keimanan/agama dalam posisi yang sentral pada

politik profetik (Shidarta, 2019). Nilai-nilai keislaman dalam konsep transendensi, memberikan pengertian bahwa dengan nilai tersebut dapat memberikan pengarah dan pedoman kehidupan yang baik bagi manusia.

Dalam menjalankan konsep transedental tersebut, Erdogan dengan latar belakang dan identitas keislamannya yang kuat, mampu menjalankan kegiatan perpolitikannya berdasarkan nilai-nilai keislaman. Erdogan berusaha untuk meyakini masyarakat Turki untuk kembali kepada identitas Islam sebagaimana masa kejayaan Kesultaan Turki Utsmani yang dulu. Erdogan tidak ingin masyarakat Turki tenggelam dalam kegelapan sekulerisme Mustafa Kemal Ataturk yang mana menghilangkan simbol-simbol Islam dari publik, menihilkan nilai-nilai Islam, dan sikap otoritarian para penguasa. Dengan keyakinan Erdogan kepada masyarakatnya untuk menjadikan Islam sebagai solusi (*Al-Islam huwa al-hal*) dalam segala aspek kehidupan, menjadikan Erdogan sebagai pemimpin yang agamis dan mendasari setiap aksi politiknya dengan keimanan kepada Allah (Junaidi, 2016).

3. Semangat Neo-Ottomanisme dalam Politik Pemerintahan Erdogan

Hadirnya sosok Recep Tayip Erdogan sebagai pemimpin Turki di abad ke-21 ini memberikan harapan baru bagi Turki dan dunia Islam lainnya. Menurut Graham E Fuller dalam bukunya *The New Turkis Republic: Turkey as a Pivotal State in the Muslim World*, ia menyatakan bahwa kehadiran Erdogan sebagai pemimpin Turki, menjadikan Turki sebagai sebuah negara yang penting di dunia Islam (*A pivotal state in the muslim world*). Dengan demikian, diharapkan Turki menjadi pemain

internasional yang dapat secara aktif berperan dalam berbagai isu baik regional maupun global. Kemenangan AK Parti sejak tahun 2002, mengantarkan Erdogan menjadi perdana menteri dan presiden yang kharismatik dimana menurut James Bainbridge dalam bukunya *Lonely Planet Turkey*, ia menyatakan Erdogan sebagai “*The skillful and inspiring leader.*”

Setelah mendapatkan kursi kepemimpinan Turki, Erdogan melakukan langkah transformasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Islamisme Turki kontemporer. Langkah transformasi politik dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan baik domestik maupun internasional. Berikut beberapa kebijakan domestik Erdogan yaitu:

- a. Pemerintah menggratiskan segala biaya pendidikan untuk masyarakat Turki dan menanggung serta meningkatkan biaya riset ilmiah sebagai tujuan untuk mewujudkan negara Turki yang maju pada 2023;
- b. Mengembalikan pelajaran Al-quran dan hadits di setiap sekolah negeri Turki dan mencabut larangan kebebasan menggunakan hijab di berbagai kampus Turki;
- c. Mewajibkan para siswa sekolah dasar sampai tingkat menengah untuk mempelajari pendidikan agama Islam;
- d. Mengembalikan pelajaran dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa kedua masyarakat Turki.

Salah satu bentuk kebijakan Erdogan yang dianggap kontroversial oleh para kelompok sekuler yaitu dicabutnya peraturan mengenai pelarangan memakai hijab.

Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan nilai sekuler yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk, dimana pada masa kepemimpinannya terdapat peraturan mengenai larangan memakai hijab. Akibat adanya larangan tersebut, Erdogan menyekolahkan anak perempuannya ke Amerika dan Eropa yang membolehkan para siswi untuk mengenakan hijab (Junaidi, 2016).

Dengan adanya fenomena ini, Erdogan justru menjadikan isu pelarangan hijab sebagai bentuk perjuangan politiknya. Terbukti hal tersebut membuat AK Parti pimpinan Erdogan memenangkan pemilihan umum pada 2007 dengan memperoleh suara yang paling tinggi yaitu 46,6% sehingga AK Parti memperoleh 341 kursi dalam perlemen.

Dari kemenangan itu, Erdogan beserta anggota perlemen dari partainya membuat proposal RUU Paket Demokrasi, dimana salah satu peraturan yang terdapat didalamnya yaitu undang-undang yang membahas mengenai dibolehkannya menggunakan hijab di ruang publik.

Selain itu, kebijakannya dalam politik luar negeri telah bergeser haluan dari nilai-nilai yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ke arah Timur yang bernuansa “Islami.” Hal tersebut dibuktikan dengan keberpihakan pemerintah Turki terhadap perjuangan umat Islam di Palestina. Erdogan secara aktif melobi dan mengkampanyekan isu Palestina ke negara-negara lain dalam forum internasional sebagai bentuk dukungan atas perjuangan Palestina. Disisi lain, sikap Erdogan yang ditunjukkan dalam diskusi Internasional *World Economic Forum* (WEF) pada 29 Januari 2009 di Davos, Swiss terhadap Perdana Menteri Israel saat itu, Simon Peres,

menjadi perhatian publik terutama dunia Islam. Dalam forum tersebut, Erdogan menyebut PM Israel dengan sebutan “pembunuh” karena telah melakukan operasi militer terhadap kelompok Hamas, Palestina. Setelah berdebat panjang lebar dengan PM Israel, Erdogan menutup aksinya dengan *walk-out* dari forum tersebut (Kompas, 29 Januari 2009).

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Turki membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara Arab, yaitu seperti menghadiri *Arab Economic Forum* di Beirut tahun 2005 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Liga Arab di Khartoum, Sudan serta memberikan status “tamu permanen” kepada Turki. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat pengaruh Turki terhadap negara-negara Arab dan menjalin kerjasama ekonomi untuk memperkuat serta menaikkan perekonomian Turki.

Dengan tetap berpegang teguh terhadap konsepsi persahabatan dengan para negara tetangga, menjadikan Turki sebagai negara yang aktif dalam memainkan perannya sebagai “pemain” dalam dunia internasional, terutama sebagai jembatan antara Eropa dan Timur Tengah. Jika pada masa sebelumnya orientasi kebijakan luar negeri lebih mengarah ke barat dan bersifat tertutup terhadap dunia Islam, maka pada masa AK Parti, orientasi kebijakan luar negerinya menyeimbangkan antara “barat dan timur” serta menggunakan “kartu Islam” sebagai alat atau sarana untuk memperluas diplomasinya ke seluruh dunia.

Aktifnya Turki dalam memainkan peran politik luar negerinya di level internasional, didasarkan pada konsepsi politik luar negeri Turki yang mana telah

ada sejak Republik Turki berdiri yaitu *yurtta sulh cihanda sulh* (Menciptakan perdamaian baik dalam level domestik maupun internasional). Semangat yang dibangun dalam konsep tersebut adalah meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara demi mewujudkan tujuan atau cita-cita negara Turki. Dengan demikian, Turki pada masa AK Parti menggunakan sarana diplomasi sebagai bentuk peningkatan nercara perdagangan dengan berbagai negara mitra, sehingga politik luar negeri Turki terlihat lebih pragmatis (Rofii, 2019).

Bangkitnya Turki dibawah kepemimpinan Erdogan dan peran politik luar negeri yang semakin aktif tersebut membuat para pengamat internasional menyebutkan bahwa Turki saat ini sedang mengalami fenomena kebangkitan “Neo-Ottomanisme”. Neo-Ottomanisme adalah bagian dari *grand strategy* Turki dalam memosisikan dirinya sebagai pemain internasional dengan menggunakan pendekatan *soft power* dan terbebas dari segala kepentingan yang merujuk pada imperialisme (Albayrak & Turan, 2016). Jadi istilah tersebut merupakan bentuk politik dan visi kenegaraan baru Turki yang berfokus pada peran kekuatan politik baik pada level domestik maupun internasional (Ismail, 2011). Istilah Neo-Ottomanisme sebagai pendefinisian terhadap kepentingan nasional dan arah kebijakan politik luar negeri Turki, memiliki dua sisi yaitu *pertama*, refleksi masa lalu terhadap kejayaan Turki Utsmani, dan *kedua*, visi masa depan Turki yang bekerjasama dengan negara tetangga terutama dalam bidang ekonomi.

Neo-Ottomanisme bukanlah ideologi imperialis. Sebaliknya, Neo-Ottomanisme merupakan (1) reartikulasi nasionalisme Turki dan peningkatan toleransi baik dalam bidang politik maupun budaya, terhadap berbagai keragaman

seperti pada masa Turki Utsmani yang lalu; (2) penghapusan perbatasan ekonomi antara negara-negara Balkan, Kaukasia, dan Timur Tengah; (3) menghormati perbatasan politik negara-negara tetangga. Neo-Ottomanisme, tidak bertujuan untuk menghilangkan batas-batas negara atau usaha untuk membangkitkan Turki Utsmani yang baru, melainkan untuk menciptakan identitas baru yang didasarkan oleh kesamaan warisan sejarah Islam Turki Utsmani (Yavuz, 1998).

Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB I sebelumnya, bahwa istilah Neo-Ottomanisme pertama kali dikenalkan oleh Ahmet Davutoglu, seorang mantan Perdana Menteri Turki (2014-2016) dan menteri luar negeri Turki (2009-2014). Menurut Davutoglu, suatu negara memiliki kekuatan politik yang ditentukan oleh dua faktor yaitu geo-politik, dan faktor kesejarahan, sementara Turki memiliki keduanya faktor tersebut. Turki diuntungkan dengan faktor geo-politiknya dimana wilayah Turki mengendalikan dan menguasai selat Bosporus, sedangkan faktor kesejarahannya (*legacy*) yaitu Turki merupakan warisan dari Kesultanan Turki Utsmani. Dengan kejayaan masa lalu tersebut, menurut Davutoglu, Turki bisa menjadi pemimpin atau penguasa di wilayah dunia Islam (Ismail, 2011).

Konstelasi politik yang saat ini sedang melanda sebagian negara di Timur Tengah, membuat Turki berpeluang untuk memainkan perannya di kawasan tersebut. Hal itu terlihat ketika Erdogan berkunjung ke negara Tunisia, Mesir, dan Libya dimana ia mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari para penggerak dan pendukung reformasi di tiga negara tersebut (Kompas, 16 September 2011). Selain itu, dalam konstelasi politik di dunia barat, Turki memiliki hubungan aliansi dengan NATO, dan bekerjasama dengan negara-negara Eropa serta Amerika

Serikat. Dengan terus menjadi pemain penting baik dalam level domestik maupun internasional, Turki diharapkan dapat mengulang kejayaan masa lalunya yang gemilang, hal inilah kemudian menjadi hakikat dari istilah Neo-Ottomanisme.

4. Sejarah Perkembangan Berdirinya AK Parti

Adalet ve Kalkinma Partisi atau Partai Keadilan Pembangunan, biasa disingkat AKP, merupakan salah satu partai politik yang berideologikan Islam. Munculnya AK Parti sebagai bentuk pemenuhan aspirasi rakyat terutama dalam bidang agama yang selama masa pemerintahan kelompok kemalis, agama justru terbelenggu dan dibatasi aktivitasnya. Dilihat dari sejarah berdirinya, AK Parti bukanlah partai dengan entitas baru, melainkan memiliki hubungan dengan partai-partai Islam terdahulu, salah satunya adalah partai yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan, Partai Refah.

Berbicara mengenai perkembangan AK Parti, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Necmettin Erbakan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri AK Parti (Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul, dan Bulent Arinc) merupakan pengikut dari Necmettin Erbakan di Partai Refah. Rekam jejak dari Erbakan dalam mendirikan partai politik, telah dimulai pada tahun 1960-an. Turki pada masa kepemimpinan Adnan Menderes dan Turgut Ozal antara tahun 1961-1980 M, membuka ruang kebebasan bagi kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi atau dasar dalam perjuangan mereka. Dari upaya liberalisasi tersebut, banyak kelompok kepentingan yang berdiri untuk mengekspresikan kepentingan mereka masing-masing.

Gambar 2. 4: Logo AK Parti



Dengan adanya liberalisasi, Necmettin Erbakan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendirikan partai politik pertamanya yang bernama Partai Orde Nasional (*Mili Nizamet Partisi*) pada 1969 M dengan menggunakan Islam sebagai identitasnya. Partai ini tidak berjalan dalam waktu yang lama, dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi Turki membubarkan partai tersebut dengan alasan anti-Ideologi negara yang sekuler. Meskipun partainya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menyulutkan perjuangan Necmettin Erbakan. Terbukti, ia mendirikan partai baru yang bernama Partai Keselamatan Nasional (*Misi Selamet Partisi*) pada 1972 M. Partai ini berusaha untuk menampung aspirasi protes masyarakat yang kekurangan peran dalam bidang ekonomi dan politik, serta aktivitas pergerakannya melalui pendekatan kepada kelompok Islam yang teralienasi akibat kebijakan sekulerisme. Meskipun arah partai ini lebih moderat, namun belum cukup meyakinkan para rezim kelompok kemalis, sehingga pada 1981 M, partai ini lagi-lagi harus bubar.

Pada periode selanjutnya, Republik Turki di bawah pimpinan Turgut Ozal, partai berhaluan Islam dapat merasakan angin segar. Selama periode

kepemimpinannya, kelompok-kelompok kepentingan Islam dapat mengkonsolidasikan kepentingannya melalui partai politik. Dengan adanya kesempatan ini, Necmettin Erbakan mendirikan lagi partai baru yaitu Partai Refah. Keberhasilan pertama Partai Refah dalam perjalanannya adalah memenangkan persaingan pemilihan wali kota di Istanbul dan Ankara pada 1994. Sedangkan puncak keberhasilannya yaitu ketika Partai Refah berkoalisi dengan DY Parti (*Dogru Yol Parti*) pimpinan Tansu Ciller, yang mana dengan adanya koalisi tersebut dapat menghantarkan Necmettin Erbakan terpilih menjadi Perdana Menteri Republik Turki.

Pada 28 Februari 1997, merupakan akhir dari Necmettin Erbakan dalam dunia politik. Pasalnya, ia harus lengser dari kursi perdana menteri akibat kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer. Dengan lengser dan ditangkapnya Erbakan, maka perjalanan Partai Refah juga mengalami masa berakhirnya di pengadilan. Setelah dibubarkannya Partai Refah, para anggota partai melakukan konsolidasi untuk pembentukan partai baru yang diberi nama Partai Saadet. Terdapat dua fraksi besar ketika proses konsolidasi berjalan, yaitu fraksi moderat dan fraksi konservatif. Dari hasil kongres tersebut, fraksi konservatif memenangkan pengambilan suara, sehingga membuat para anggota fraksi moderat seperti Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul, dan Bulent Arinc, keluar dari garis perjuangan Erbakan dan mendirikan partai politik baru.

Awal perjuangan Erdogan dalam kancah politik ditandai dengan berdirinya AK Parti pada 14 Agustus 2001 sebagai partai yang berhaluan Islamis dan konservatif. Berdirinya AK Parti menjadikan titik balik dalam dunia perpolitikan

Turki. Hal tersebut ditandai dengan kemenangan AK Parti dalam konstetasi pemilu 3 November 2002, dan berbagai kemenangan yang diraih pada pemilu 2007, 2011, 2015 serta pemilihan presiden pada 2014, menandai bahwa kemenangan yang diraih oleh rezim AK Parti menjadi pintu gerabng dalam membangun Turki Modern. Dengan rekor kemenangan beruntun dalam pemilu tahunan, menjadikan rezim AK Parti mengalahkan rekor kepemimpinan Perdana Menteri Inggris dan ketua umum dari Partai Konservatif Inggris, Margareth Thatcher yang berkuasa selama sebelas tahun (Rofii, 2019).

Gambar 2. 5: Geneologi AK Parti



5. Profil Manifesto Politik AK Parti

Manifesto Politik adalah bagian dari ruh perjuangan gerakan politik yang menjadi manifestasi para anggota partai dalam perjuangan dan pencapaian tujuan atau kepentingan suatu partai. Bagi AK Parti, bentuk dari manifesto politiknya adalah menjangkau semua kalangan yang ada di Turki baik kelas menengah yang memiliki pemikiran liberal, sekuler, rasional, maupun konservatif. Dalam proses menjangkau semua kalangan, AK Parti menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga dari pendekatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Selain dengan menggunakan berbagai pendekatan, terdapat narasi yang digaungkan oleh AK Parti dalam hal ini Erdogan, di mana narasi tersebut mendapatkan perhatian publik. *New Turkey* atau Turki Baru, merupakan narasi

yang digaungkan oleh Erdogan untuk menghadirkan perubahan bagi Turki. Makna narasi *New Turkey* tersebut adalah Turki meninggalkan budaya Turki Lama yang korup, meninggalkan ‘pemujaan’ yang berlebihan/fanatisme terhadap ideologi kemalisme yang tertutup, meninggalkan pada prinsip kelompok republikan yang mengabaikan hak-hak fundamental masyarakat, dan meninggalkan mental inferior terhadap bangsa Eropa.

Dari narasi dan pidato-pidatonya selama masa kampanye pemilu 2002, membuat Erdogan dan AK Parti menjadi pihak yang paling banyak disoroti. Kritik yang ia lontarkan kepada pemerintah yang berkuasa, membuat perhatian publik tertuju pada sosok Erdogan. Pada akhirnya, pemenang pemilu 2002 secara mengejutkan di menangkan oleh AK Parti dengan perolehan 34% suara atau menduduki 365 dari 550 kursi di parlemen, mengungguli pesaingnya dari partai berhaluan sekuler yaitu *Cumhuriyet Hal Partisi* atau Partai Rakyat Republik yang hanya memperoleh 19% suara. Kemenangan tersebut sudah cukup untuk mengantarkan rezim AK Parti menjadi penguasa tunggal di pemerintahan.